

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu memiliki peran penting agar dapat dipilih sebagai bahan dasar dalam merancang tahapan penelitian secara terstruktur. Ada beberapa riset dan penelitian yang telah dilakukan yang dapat peneliti temukan dan relevan terkait Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP). Dalam hal ini peneliti menemukan dua skripsi dan satu jurnal nasional tentang efektivitas PIP. Penyajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengkayaan konsep terkait Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP).

NO	Penelitian Judul	Hasil Penelitian	Persamaan penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Setyawati, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kartu Indonesia Pintar efektif lebih dari 70% untuk siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, dengan rata-rata sebesar 92,10, lebih tinggi dari 78,4, dan hasil	Sama-sama meneliti efektivitas Program KIP. Topik dan ruang lingkup yang serupa, yaitu evaluasi implementasi kebijakan pemerintah.	Peneliti fokus pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian ini berfokus pada jenjang pendidikan tinggi (Kuliah) di Universitas

		uji t sebesar 0,000, lebih rendah dari 0,05.		Lampung.
2.	(Nurfadillah, 2024), Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 15 Makassar	Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Program PIP di SMA Negeri 15 Makassar telah berjalan efektif, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Teori efektivitas Sutrisno (2010) digunakan dalam penelitian ini. Ada lima indikator yang digunakan: pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan	Sama-sama meneliti efektivitas Program KIP/PIP. Menggunakan pendekatan kualitatif dan menganalisis keberhasilan program dari beberapa aspek.	Peneliti berfokus pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Makassar, sementara penelitian ini mengkaji implementasi KIP-Kuliah di Universitas Lampung. Selain itu, peneliti menggunakan teori efektivitas Sutrisno (2010), sementara penelitian ini berfokus pada konsep implementasi

		perubahan nyata.		kebijakan
2.	(Fahmi & Stiawati, 2023), Penerapan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Implementasi program KIP-Kuliah telah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa masalah, seperti program yang tidak mencapai sasarannya, keterlambatan pencairan dana, dan kurangnya transparansi.	Sama-sama meneliti implementasi Program KIP-Kuliah dan memiliki fokus yang serupa pada tingkat universitas. Mengidentifikasi isu-isu yang sama seperti ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan pencairan dana	Peneliti berlokasi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), sementara penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung.

2.2 DASAR TEORI

2.2.1 TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Biasanya, implementasi berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau badan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Jika dikaitkan dengan kebijakan Sebenarnya, sebuah kebijakan tidak cukup hanya dirumuskan lalu dituangkan dalam bentuk resmi seperti undang-undang, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut. Kebijakan harus dijalankan atau diimplementasikan agar benar-benar memberikan dampak nyata serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa pengertian penerapan kebijakan menurut para ahli yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008), implementasi dipahami sebagai proses untuk melihat secara nyata apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan dan diberlakukan. Proses ini meliputi berbagai peristiwa serta aktivitas yang dilakukan dengan tujuan mengelola kebijakan sehingga dapat menghasilkan dampak atau perubahan nyata bagi masyarakat. (Pramono, 2020)
- 2) Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang berasal dari keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk menerjemahkan keputusan menjadi langkah-langkah operasional dalam jangka waktu tertentu, sekaligus melanjutkan berbagai usaha guna mewujudkan perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan ketetapan kebijakan. Seluruh proses ini dijalankan oleh organisasi publik dengan tujuan utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Menurut Parsons (dalam Joko Pramono, 2020) Implementasi kebijakan diartikan sebagai "proses yang melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan prosedur birokrasi yang menghasilkan tindakan-tindakan publik yang nyata, dari hasil interaksi satu dengan yang lain." Definisi ini menyoroti kompleksitas implementasi yang melibatkan berbagai elemen birokrasi dan interaksi antar-aktor.

Maka dapat peneliti simpulkan bahwa, implementasi kebijakan bukanlah sekadar tindakan tunggal yang langsung, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan

serangkaian kegiatan dan banyak pihak, baik individu maupun organisasi, dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bekerja sama untuk mengubah suatu keputusan kebijakan yang bersifat konseptual menjadi tindakan operasional yang nyata di lapangan.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Menurut George C. Edwards III (dalam Agustino, 2006; Pramono, 2020), terdapat empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Selain itu, kelompok sasaran kebijakan juga perlu diberi informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan tersebut agar tidak terjadi penolakan atau kesalahpahaman.

2) Sumber Daya

Selain kejelasan informasi, keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan sulit berjalan optimal. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, seperti kemampuan pelaksana kebijakan, serta sumber daya keuangan sebagai penunjang kegiatan.

3) Disposisi

Disposisi berkaitan dengan sikap, karakter, dan watak para pelaksana kebijakan. Hal-hal seperti komitmen, kejujuran, serta sikap demokratis menjadi faktor penting karena memengaruhi kesungguhan dalam menjalankan kebijakan.

4) Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai organisasi pelaksana kebijakan juga memengaruhi hasil implementasi. Untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik, diperlukan adanya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas. SOP ini berfungsi sebagai panduan kerja bagi para pelaksana agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan tepat.

2.2.2 KONSEP EFEKTIVITAS PROGRAM

Menurut (Amroni et al., 2023) Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai (output) dengan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar peran output dalam mewujudkan tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan. Dengan kata lain, efektivitas menitikberatkan pada hasil (outcome), di mana suatu program atau kegiatan dianggap efektif apabila output yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas memiliki keterkaitan hasil dan tujuan. Makin besar peran atau andil keluaran dalam mencapai tujuan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu organisasi, program, atau kegiatan tersebut. kaitan ini, keluaran yang ada di sini merupakan hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Sasaran sasaran atau tujuannya adalah untuk menyemangati masyarakat, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan setelah merdeka. Program ini dapat dikatakan efektif apabila hasilnya menunjukkan mampu mengurangi jumlah kemiskinan anggota masyarakat sehingga memenuhi tujuan awal yang telah ditetapkan (Amroni et al., 2023).

Program dapat dipahami sebagai sebuah rencana besar yang memanfaatkan berbagai sumber daya untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Rencana ini tersusun dalam pola yang teratur, berisi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan, serta jadwal pelaksanaannya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai (Hasna et al., 2025). Dengan kata lain, program adalah rancangan menyeluruh yang mengatur kegiatan beserta waktunya supaya hasil yang diharapkan bisa terwujud.

Efektivitas program sendiri merujuk pada sejauh mana suatu program mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Najidah & Lestari (2019) menjelaskan bahwa efektivitas terlihat ketika ada kesesuaian antara harapan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program berarti tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang sudah dirumuskan, di mana di dalamnya terdapat tugas pokok yang harus dijalankan.

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria pengukuran efektivitas, adapun menurut (Najidah & Lestari, 2019) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

1. Ketetapan Sasaran Program yaitu sejauhmana keberhasilan peserta program sesuai dengan tepat sasaran yang telah ditentukan.
2. Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian Tujuan Program yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
4. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program.

Kemudian menurut (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) untuk mengukur suatu efektivitas program didalam sebuah organisasi menggunakan lima indikator yaitu:

- a. Pemahaman Program, berarti sejauh mana organisasi atau masyarakat mampu mengerti isi dan tujuan program sehingga bisa dijalankan untuk kepentingan bersama.
- b. Tepat Sasaran, menekankan pada keberhasilan program dalam menjangkau kelompok yang memang menjadi target. Suatu program dianggap berhasil jika isi dan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan sasaran yang dituju.
- c. Tepat Waktu melihat kesesuaian pelaksanaan program dengan jadwal yang sudah direncanakan. Perencanaan kegiatan dan pengaturan waktu penting agar program dapat terukur dan berjalan sesuai tujuan.
- d. Tercapainya Tujuan, berarti keberhasilan program dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan sejak awal. Program baru bisa disebut efektif jika hasilnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- e. Perubahan Nyata menunjukkan sejauh mana program memberi dampak langsung pada masyarakat. Perubahan ini bisa dilihat dengan membandingkan kondisi

sebelum dan sesudah program dilaksanakan. pengukuran efektivitas program yang paling menonjol adalah sebagai berikut : Keberhasilan program, Keberhasilan sasaran, Kepuasan terhadap program, Tingkat output dan input, serta Pencapaian tujuan menyeluruh (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020)

Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas program diatas, maka peneliti menggunakan indikator untuk mengukur efektivitas menurut (Nurfauziah & Nurcahyanto, 2020) karena teori tersebut cocok untuk menganalisis Efektivitas Program Indonesia Pintar (PIP) di Perguruan Tinggi Universitas Lampung.

2.2.3 KONSEP PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada dasarnya merupakan sebuah keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin pemerataan pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan yang berkualitas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, memperbesar peluang keberlanjutan pendidikan, mengurangi jumlah anak putus sekolah, serta mendorong peningkatan prestasi siswa. Pelaksanaannya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas pendidikan nasional.

Program Indonesia Pintar termasuk ke dalam program perlindungan sosial yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa program perlindungan sosial ini mencakup Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Tujuan utama PIP adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk bisa tetap bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan menengah, serta mencegah atau menarik kembali peserta didik yang terlanjur putus sekolah (Nadia et al., 2024).

Penerima bantuan PIP diprioritaskan kepada anak berusia 6–21 tahun. Syarat untuk mendapatkan bantuan ini pada pendidikan formal adalah peserta didik harus terdaftar dalam Dapodik sekolah dan diusulkan secara resmi oleh pihak sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota kepada direktorat teknis Kemendikbud.

Penerima bantuan PIP diprioritaskan kepada anak berusia 6–21 tahun. Syarat untuk mendapatkan bantuan ini pada pendidikan formal adalah peserta didik harus terdaftar dalam Dapodik sekolah dan diusulkan secara resmi oleh pihak sekolah melalui dinas pendidikan kabupaten/kota kepada direktorat teknis Kemendikbud.

Menurut data Puslapdik tahun 2023, jumlah penerima PIP mencapai 9.745.403 siswa, dengan 774.205 di antaranya merupakan siswa SMA/ sederajat. Besaran bantuan dana yang diberikan berbeda tergantung jenjang dan kelas: siswa kelas XI SMA menerima Rp1.000.000 per tahun, sementara siswa kelas X dan XII SMA mendapat Rp500.000 per semester. Untuk mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka, dana yang diberikan sebesar Rp6 juta per tahun. Dari jumlah tersebut, Rp2,4 juta langsung disetorkan kepada perguruan tinggi untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), sedangkan Rp4,2 juta diberikan kepada mahasiswa sebagai uang saku untuk kebutuhan kuliah. Besaran UKT yang ditanggung pemerintah berbeda-beda, tergantung akreditasi program studi yang ditempuh—semakin tinggi akreditasi, maka biaya UKT yang ditanggung juga semakin besar (Fahmi & Stiawati, 2023).

Bantuan dana PIP ditujukan untuk menunjang kebutuhan pendidikan peserta didik agar mereka dapat terus melanjutkan sekolah hingga selesai jenjang menengah. Dana tersebut dipergunakan untuk:

1. Membeli buku dan alat tulis
2. Membeli pakaian dan perlengkapan perkuliahan seperti sepatu dan tas
3. Membayar transportasi menuju sekolah / kuliah
4. Uang saku harian untuk siswa
5. Serta, membayar biaya tambahan

Penerima PIP tidak diperbolehkan menggunakan dana ini untuk kegiatan yang tidak terkait pendidikan, misalnya untuk judi, narkoba, minuman keras, maupun hal negatif lainnya. Setelah menerima bantuan, peserta didik memiliki kewajiban untuk menggunakan dana sesuai aturan, rajin bersekolah, disiplin dalam menjalankan tugas, berperilaku baik, serta menjauhi perbuatan tercela (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

Menurut Marsa & Santoso (2025), mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar terdiri dari tiga tahap utama, yaitu:

- a. Mekanisme Pengusulan

Calon penerima PIP diusulkan sesuai Petunjuk Teknis Kemendikbud. Siswa yang berasal dari keluarga pemilik PKH/KKS/KIP harus diperbarui datanya dalam aplikasi Dapodik dengan lengkap dan benar. Data ini kemudian menjadi dasar usulan dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota. Setelah disetujui, usulan tersebut diteruskan ke direktorat teknis di Kemendikbud.

b. Mekanisme Penetapan

Direktorat teknis menerima data usulan dari dinas pendidikan, lalu menetapkan penerima PIP melalui Surat Keputusan (SK). Untuk siswa SMA/ sederajat yang berada di bawah wewenang provinsi, pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

c. Mekanisme Penyaluran

Dana PIP 2023 disalurkan melalui lembaga keuangan sesuai daftar nama penerima yang tercantum dalam SK. Prosesnya dimulai dari penerbitan dokumen keuangan oleh KPPN berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah itu, dana masuk ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis, lalu diteruskan ke rekening masing-masing siswa penerima melalui Tabunganku atau virtual account. Direktorat teknis juga memberikan informasi daftar penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima.

Penerima PIP dapat mencairkan dana dengan membawa dokumen pendukung, seperti Surat Keterangan dari kepala sekolah, fotokopi rapor, serta KTP. Jika siswa belum memiliki KTP, pencairan dapat didampingi orang tua dengan menunjukkan KTP orang tua. Penerima juga wajib menandatangani bukti penerimaan dana yang disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang menggunakan virtual account dan tinggal di daerah terpencil, pencairan dana bisa dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah atau bendahara.

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan telaah teori dan hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dirumuskan dan digambarkan sebagaimana ditunjukkan pada ilustrasi berikut.:

Evektifitas Penyaluran Beasiswa
Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di
Universitas Lampung



Kemiskinan menjadi penghambat bagi
masyarakat dalam mempreoleh akses
pendidikan, sehingga berdampak
dalam kemajuan dibidang pendidikan



Melalui UU NO 12 Tahun 2012
Tentang pendidikan, pemerintah diberi
mandat menjamin keadilan,
pemerataan, keterjangkauan akses
pendidikan.



Kehadiran Program Indonesia Pintar
(PIP) diharapkan mampu membuka
kesempatan yang sama bagi seluruh
anak indonesia untuk memperoleh
pendidikan dari SD sampai Ke
Perguruan Tinggi



- Manfaat dana pendidikan
- Ketepatan sasaran
- Keberlangsungan studi mahasiswa



Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung dengan melibatkan Pengurus PIP Di Univ.Lampung dan Mahasiswa sebagai objek penelitiannya



Mahasiswa menerima program dan sesuai dengan kebutuhan



Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung dengan melibatkan Pengurus PIP Di Univ.Lampung dan Mahasiswa sebagai objek penelitiannya



Secara ideal, PIP Menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan namun kenyataannya justru keluarga mampu yang mendapatkan bantuan

2.4 HIPOTESIS

H1= Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berpengaruh dan cukup baik dalam pelaksanaannya, meskipun belum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena terkendala oleh hambatan

H0=Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tidak berpengaruh besar terhadap keefektifan program di Universitas Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amroni, M. Al, Alhadihaq, M. Y., & Sumiati, N. (2023). Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 158. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1521>
- Fahmi, T. N., & Stiawati, T. (2023). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Jurnal Ilmiah Negara*, 15(1), 68–80.
- Hasna, Setiawan, I., & Febriadi, H. (2025). Herry Febriadi | Efektivitas Program Indonesia. 1111. <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/PPJ/article/view/1182>
- Marsa, D. M., & Santoso, R. S. (2025). Implementasi Program Pndonesia Pintar (PIP) Di SMA Kecamatan Banyumanik Bota Semarang. *Journal of Public Policy and Management*, 1, 631–648. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.49149>
- Nadia Nadia, Fitri Kurnianingsih, & Ramadhani Setiawan. (2024). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(3), 181–194. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.521>
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Nurfadillah. (2024). *Skripsi Efektivitas Program Indonesia Pintar (Pip) Di Sma Negeri 15 Makassar Program Studi Administrasi Publik*.
- Nurfauziah, N. M., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Efektivitas Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kabupaten Purwakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 15–34.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar

Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104. <https://doi.org/10.52166/madani.v14i1.2886>

Setyawati, S. (2018). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bagi Siswa SMK Di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar). *Iain Purwokerto : Skripsi*, 12, :1-106. <https://eprints.uinsaizu.ac.id/3408/2/SARAS~1.pdf>